



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum.....	5
1.4 Kedudukan dan Ruang Lingkup	6
1.5 Proses Penyusunan	7
1.6 Sistematika Pengkajian	7
BAB II KONDISI UMUM DAERAH.....	8
2.1 Luas dan Letak Wilayah.....	8
2.2 Kondisi Topografi	9
2.3 Kondisi Klimatologi	10
2.4 Kondisi Geologi	11
2.5 Kondisi Hidrologi	14
2.6 Penggunaan Lahan.....	16
2.7 Kependudukan	18
2.8 Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21
2.9 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	22
2.10 Peretumbuhan PDRB.....	26
2.11 Panjang Jalan Dilalui Roda 4.....	29
2.12 Panjang Jalan Kabupaten (Provinsi) Dalam Kondisi Baik (>40Km/ Jam).....	30
2.13 Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	35
2.14 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	35
2.15 Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	35
2.16 Aksesibilitas.....	35
2.17 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	36
2.18 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	37
2.19 Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)	38
2.20 Penyadnagn Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial	39
2.21 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	39
2.22 Kepemilikan KTP	40
2.23 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.....	41
2.24 Rasio Pendudk ber-KTP per Satuan Penduduk	41
2.25 Rasio bayi Berakte Kelahiran.....	42
2.26 Rasio Pasangan Berkate Nikah	43
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH	44
3.1 Konsep Kemiskinan	44
3.2 Kondisi Umum Kemiskinan Daerah	45
3.3 Analisis Kondisi Umum Kemiskinan Daerah	59



BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN	79
4.1 Capaian Bidang Pendidikan	79
4.2 Capaian Bidang Kesehatan	115
4.3 Capaian Bidang Infrastruktur Dasar	131
4.4 Capaian Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan	145
BAB V ANALISIS APBD	162
5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	162
5.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan	169
5.3 Kerangka Pendanaan	174
BAB VI KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	181
6.1 Pemetaan Program	181
6.2 Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan	185
6.3 Kelembagaan	191
6.4 Sistim Koordinasi dan Pengendalian	192
6.5 Penguatan Kelompok Kerja TKPK	192
6.6 Permasalahan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	193
BAB VII ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	194
7.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	194
7.2 Isu Strategis	206
BAB VIII RENCANA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI	207
8.1 Mekanisme dan Prosedur Monitoring	207
8.2 Tanggungjawab Masing-masing Pihak	208
8.3 Metode Pemantauan yang Direkomendasikan	209
8.4 Indikator Monitoring	210
8.5 Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat	212
BAB IX PENUTUP	214
9.1 Kesimpulan	214
9.2 Rekomendasi	214
DAFTAR PUSTAKA	215
LAMPIRAN	216
1. Program RAD Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltara Tahun 2017-2021	216
2. Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.96/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kaltara Tahun 2016	224